



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 130 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIPARAY
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ciparay Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 138 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 44);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Penutup; dan

- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
 - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 130

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
BANDUNG
NOMOR 130 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIPARAY
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

Pemerintah
Kabupaten Bandung



BUPATI BANDUNG PERATURAN



PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025



KECAMATAN CIPARAY
KABUPATEN BANDUNG



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 008.1.1/KEP.131-BAPPERIDA/2024

LAMPIRAN : 2 (DUA)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun rencana kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 92).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:

1. Tim Pengarah,
2. Tim Teknis,
3. Sekretariat.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran berjalan.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bandung Nomor 050/KEP.107-BAPPELITBANGDA/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 7 MARET 2024

BUPATI BANDUNG,



MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

TEMBUSAN, disampaikan kepada:

- Yth. 1. Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
3. Para Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
4. Seluruh Anggota Tim.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 008.1.1/KEP.131-BAPPERIDA/2024
TANGGAL : 7 MARET 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BANDUNG

I. TIM PENGARAH

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
Wakil Pengarah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung.
Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Bandung;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Bandung.

II. TIM TEKNIS

Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung.
Sekretaris : Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
Anggota : 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bandung;
2. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Bandung;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bandung;
4. Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bandung;
5. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Dan Statistik Kabupaten Bandung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Bandung;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Bandung;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata
Ruang Kabupaten Bandung;
9. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten
Bandung;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bandung;
11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bandung;
12. Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran Dan
Penyelamatan Kabupaten Bandung;

13. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung;
14. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung;
15. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung;
16. Kepala Dinas Pangan Dan Perikanan Kabupaten Bandung;
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;
18. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bandung;
20. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung;
21. Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bandung;
22. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
23. Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bandung;
24. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Bandung;
25. Kepala Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Bandung;
26. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung;
27. Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Bandung;
28. Inspektur Daerah Kabupaten Bandung;
29. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bandung;
30. Camat Cileunyi;
31. Camat Cilengkrang;
32. Camat Cimenyan;
33. Camat Bojongsoang;
34. Camat Margahayu;
35. Camat Margaasih;
36. Camat Dayeuhkolot;
37. Camat Katapang;
38. Camat Pameungpeuk;
39. Camat Arjasari;
40. Camat Pangalengan;
41. Camat Cimaung;
42. Camat Banjaran;
43. Camat Cicalengka;
44. Camat Rancaekek;
45. Camat Cikancung;
46. Camat Nagreg;
47. Camat Baleendah;
48. Camat Pacet;
49. Camat Kertasari;
50. Camat Ciparay;
51. Camat Majalaya;

52. Camat Ibun;
53. Camat Paseh;
54. Camat Solokanjeruk;
55. Camat Pasirjambu;
56. Camat Ciwidey;
57. Camat Rancabali;
58. Camat Soreang;
59. Camat Cangkuang;
60. Camat Kutawaringin.

III. TIM VERIFIKATOR

1. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Ketua Kelompok : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.

Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung.

Anggota :

1. Kepala Bagian Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
2. Perencana Ahli Muda - Yanti Megayanti, S.Sos, M.Si pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung;
3. Perencana Ahli Muda - Puni Seruni, ST, MT pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung;
4. Perencana Ahli Muda - Irma Winarni, STP. ME pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung;
5. Perencana Ahli Muda - Budi Darmawan, S.Pt, MT.,MPP pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung;
6. Perencana Ahli Pertama - Rani Nurfitriani, SE pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung;

2. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

Ketua Kelompok : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.

Sekretaris : Kabid Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung.

Anggota :

1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;

2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
 3. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
 4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung;
 5. Kepala Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung;
 6. Perencana Ahli Muda - Yana Barlian, SH, MM. pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung;
 7. Perencana Ahli Muda - Agung Rahadian, S.IP, M.Si pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung;
 8. Perencana Ahli Pertama - Nicola Sandhy Tuerah Santoso, SE pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung.
3. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan
- Ketua Kelompok : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
- Kerja
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung.
- Anggota : 1. Perencana Ahli Muda - Ai Kania, SP, ME.
- : Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung;
- : 2. Perencana Ahli Muda - Opi Sugilar, ST pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung;
- : 3. Perencana Ahli Muda - Indra Gunawan, S.Hut, MP pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung;
- : 4. Perencana Ahli Pertama - Mira Prayuningtias, SE pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung;

IV. SEKRETARIAT

Koordinator : Perencana Ahli Muda – Primayanti Sri Astuti., SH pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung.

BUPATI BANDUNG,



MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 008.1.1/KEP.131-BAPPERIDA/2024

TANGGAL : 7 MARET 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BANDUNG

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

I. TIM PENGARAH

A. Ketua

1. Memberikan arahan kebijakan dalam penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah pada Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
2. Memimpin rapat pimpinan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
3. Memberikan arahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
4. Melaporkan hasil pekerjaan Tim Teknis Penyusunan kepada Bupati Bandung.

B. Wakil Pengarah

1. Mengkoordinasikan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
2. Memimpin rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung.
3. Memberi penjelasan teknis dari arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung.
4. Memimpin merumuskan kebijakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
5. Melaporkan hasil kerja Tim Teknis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pengarah Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

C. Anggota

1. Membantu dalam mengkoordinasikan rapat pimpinan dan rapat koordinasi teknis.
2. Mewakili ketua/wakil ketua dalam memimpin rapat koordinasi teknis.
3. Memberikan masukan teknis atas arah kebijakan pembangunan secara sektoral/parsial sesuai tugas pokok dan fungsinya.
4. Memberi masukan dan turut serta dalam perumusan kebijakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
5. Turut serta dalam persiapan dan penyampaian laporan hasil kerja Tim Teknis Penyusunan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pengarah Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

II. TIM TEKNIS

A. Ketua Tim Teknis

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
2. Memimpin Rapat Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

3. Mengkoordinasikan dan menyinkronkan seluruh pekerjaan kelompok dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
4. Melaksanakan perumusan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung.
5. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
6. Turut serta dan memberi masukan dalam rapat pimpinan.
7. Menelaah dan mengkoreksi isi dan substansi Bab I,II,III,IV dan V dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
8. Melaporkan hasil kerja Tim Teknis Kepada Ketua/Wakil Ketua Pengarah.

B. Sekretaris

1. Membantu Ketua Tim Teknis dalam Mengkoordinasi pelaksanaan teknis penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
2. Memfasilitasi dan membantu ketua dalam rapat Tim Teknis dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
3. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan rancangan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung.
4. Memfasilitasi penyelenggaraan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
5. Turut serta dan memberi masukan dalam rapat pimpinan.
6. Membantu Ketua dalam melakukan penelaahan dan koreksi atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

C. Anggota

1. Menyediakan dan membuat analisa/telaahan data dan informasi gambaran umum kondisi daerah, mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
2. Melaksanakan pemantauan (pengendalian dan/atau evaluasi kebijakan) penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
3. Membantu dalam mengkoordinasi dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
4. Turut serta dan memberi masukan dalam rapat pimpinan dan/atau rapat pembahasan tim teknis penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
5. Menyusun, Menelaah dan mengkoreksi isi dan substansi Bab I,II,III,IV dan V dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
6. Melaporkan hasil kerja kepada Ketua Tim Teknis.

III. TIM VERIFIKATOR

1. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 - a. Ketua Kelompok Kerja
 - 1) Mengkoordinasikan pengolahan data gambaran kondisi daerah yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat dalam hal pemerataan ekonomi, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing dalam hal fokus kemampuan ekonomi dan fokus iklim investasi.

- 2) Mengkoordinasikan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang diperoleh dari hasil rapat dengar pendapat dan penyerapan aspirasi melalui reses tahun sebelumnya, yang dikelompokkan ke dalam urusan, program, kegiatan, subkegiatan Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam.
- 3) Mengkoordinasikan dan merumuskan usulan program, kegiatan dan subkegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
- 4) Merumuskan permasalahan pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam.
- 5) Merumuskan kerangka ekonomi dan arah kebijakan ekonomi daerah.
- 6) Merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam.
- 7) Mengkoordinasikan dan menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan sesuai tanggungjawab dan tugas fungsi Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi usulan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas pada rancangan renja Perangkat Daerah, dalam rangka mencapai target indikator kinerja Renstra Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam.
- 9) Turut serta dalam pelaksanaan forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam.
- 10) Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah di kompilasi dengan usulan wilayah hasil forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam.
- 11) Mengkoordinasikan perumusan dan analisis capaian program, kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan Renja Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam.
- 12) Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam.
- 13) Turut serta dan memberi masukan dalam rapat pimpinan dan/atau rapat pembahasan tim teknis penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- 14) Menelaah dan mengkoreksi isi dan substansi Bab I,II,III,IV dan V dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- 15) Melaporkan hasil kerja anggota kepada Ketua Tim Teknis Penyusunan.

b. Sekretaris

- 1) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan pengolahan data gambaran kondisi daerah yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat dalam hal pemerataan ekonomi, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing dalam hal fokus kemampuan ekonomi dan fokus iklim investasi.

- 2) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang diperoleh dari hasil rapat dengar pendapat dan penyerapan aspirasi melalui reses tahun sebelumnya, yang dikelompokkan ke dalam urusan, program, kegiatan, subkegiatan Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam.
- 3) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan dan merumuskan usulan program, kegiatan dan subkegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
- 4) Membantu Ketua dalam Merumuskan permasalahan pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam.
- 5) Membantu Ketua dalam Merumuskan kerangka ekonomi dan arah kebijakan ekonomi daerah.
- 6) Membantu Ketua dalam Merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam.
- 7) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan dan menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan sesuai tanggungjawab dan tugas fungsi Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam.
- 8) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi usulan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas pada rancangan renja Perangkat Daerah, dalam rangka mencapai target indikator kinerja Renstra Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam.
- 9) Turut serta dalam pelaksanaan forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam.
- 10) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah di kompilasi dengan usulan wilayah hasil forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam.
- 11) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan perumusan dan analisis capaian program, kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan Renja Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam.
- 12) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam.
- 13) Turut serta dan memberi masukan dalam rapat pimpinan dan/atau rapat pembahasan tim teknis penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
- 14) Membantu Ketua dalam Menelaah dan mengkoreksi isi dan substansi Bab I,II,III,IV dan V dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
- 15) Membantu Ketua dalam Melaporkan hasil kerja anggota kepada Ketua Tim Teknis Penyusunan.
- 16) Mengelola sub kegiatan Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya didalam SIPD.

c. Anggota

- 1) Menyediakan dan membuat analisa/telaahan data dan informasi gambaran umum kondisi daerah mencakup aspek kesejahteraan masyarakat fokus pemerataan ekonomi, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah fokus kemampuan ekonomi dan fokus iklim usaha.
- 2) Melaksanakan inventarisasi jenis program, kegiatan dan subkegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang diperoleh dari hasil rapat dengar pendapat dan penyerapan aspirasi melalui reses tahun sebelumnya pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam.
- 3) Merekap dan melaporkan hasil inventarisasi jenis program, kegiatan dan subkegiatan yang diusulkan DPRD bahan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
- 4) Melakukan perumusan permasalahan pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam.
- 5) Melakukan perumusan kerangka ekonomi dan arah kebijakan ekonomi daerah.
- 6) Melakukan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam.
- 7) Melakukan penyelerasan prioritas dan sasaran pembangunan sesuai tanggungjawab dan tugas fungsi Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam.
- 8) Melaksanakan verifikasi usulan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas pada rancangan renja Perangkat Daerah, dalam rangka mencapai target indikator kinerja Renstra Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam.
- 9) Menyampaikan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah, tentang kesesuaian antara rancangan Renja Perangkat Daerah dengan capaian target indikator kinerja Renstra Perangkat Daerah dan/atau Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. Sehingga apabila Renja Perangkat Daerah belum sesuai, maka dianjurkan Perangkat Daerah untuk menyempurnakannya.
- 10) Turut serta dalam pelaksanaan forum Perangkat Daerah pada lingkup Perangkat Daerah bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam.
- 11) Melaksanakan verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah di kompilasi dengan usulan wilayah hasil forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam.
- 12) Melaksanakan penyusunan rumusan dan analisis capaian program, kegiatan dan subkegiatan pada rancangan Renja Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam.
- 13) Turut serta dan memberi masukan dalam rapat pimpinan dan/atau rapat pembahasan tim teknis penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
- 14) Melaporkan hasil kerja kepada Koordinator Bidang.

2. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

a. Ketua Kelompok Kerja

- 1) Mengkoordinasikan pengolahan data gambaran kondisi daerah yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing fokus pada sumber daya manusia.
- 2) Mengkoordinasikan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang diperoleh dari hasil rapat dengar pendapat dan penyerapan aspirasi melalui reses tahun sebelumnya, yang dikelompokkan kedalam urusan, program, kegiatan dan subkegiatan PD pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.
- 3) Mengkoordinasikan dan merumuskan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
- 4) Merumuskan permasalahan pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.
- 5) Merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.
- 6) Mengkoordinasikan dan menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan sesuai tanggungjawab dan tugas fungsi Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi usulan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas pada rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dalam rangka mencapai target indikator kinerja Renstra PD pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.
- 8) Turut serta dalam pelaksanaan forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah di kompilasi dengan usulan wilayah hasil forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.
- 10) Mengkoordinasikan perumusan dan analisis capaian program, kegiatan sub kegiatan pada rancangan Renja Perangkat Daerah bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.
- 11) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.
- 12) Turut serta dan memberi masukan dalam rapat pimpinan dan/atau rapat pembahasan tim teknis penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
- 13) Menelaah dan mengoreksi isi dan substansi Bab I,II,III,IV dan V dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
- 14) Melaporkan hasil kerja anggota kepada Ketua Tim Teknis Penyusunan.

b. Sekretaris

- 1) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan pengolahan data gambaran kondisi daerah yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing fokus pada sumber daya manusia.
- 2) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang diperoleh dari hasil rapat dengar pendapat dan penyerapan aspirasi melalui reses tahun sebelumnya, yang dikelompokkan kedalam urusan, program, kegiatan dan subkegiatan PD pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.
- 3) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan dan merumuskan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
- 4) Membantu Ketua dalam Merumuskan permasalahan pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.
- 5) Membantu Ketua dalam Merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.
- 6) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan dan menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan sesuai tanggungjawab dan tugas fungsi Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.
- 7) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi usulan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas pada rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dalam rangka mencapai target indikator kinerja Renstra PD pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.
- 8) Turut serta dalam pelaksanaan forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.
- 9) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah di kompilasi dengan usulan wilayah hasil forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.
- 10) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan perumusan dan analisis capaian program, kegiatan sub kegiatan pada rancangan Renja Perangkat Daerah bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.
- 11) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.
- 12) Turut serta dan memberi masukan dalam rapat pimpinan dan/atau rapat pembahasan tim teknis penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
- 13) Turut serta dan memberi masukan dalam penyusunan bahan ekspose Ketua Tim Penyusun Kepada Bupati.
- 14) Membantu Ketua dalam Menelaah dan mengkoreksi isi dan substansi Bab I,II,III,IV dan V dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
- 15) Membantu Ketua dalam Melaporkan hasil kerja anggota kepada Ketua Tim Teknis Penyusunan.

- 16) Mengelola sub kegiatan Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya didalam SIPD.

c. Anggota

- 1) Menyediakan dan membuat analisa/telaahan data dan informasi gambaran umum kondisi daerah mencakup aspek kesejahteraan masyarakat fokus kesejahteraan sosial fokus seni budaya dan olahraga, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah fokus pada sumber daya manusia.
- 2) Melaksanakan inventarisasi jenis program, kegiatan dan subkegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang diperoleh dari hasil rapat dengar pendapat dan penyerapan aspirasi melalui reses tahun sebelumnya, bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.
- 3) Merekap dan melaporkan hasil inventarisasi jenis program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan DPRD bahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
- 4) Melakukan perumusan permasalahan pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.
- 5) Melakukan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.
- 6) Melakukan penyelerasan prioritas dan sasaran pembangunan sesuai tanggungjawab dan tugas fungsi Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.
- 7) Melaksanakan verifikasi usulan program, kegiatan subkegiatan prioritas pada rancangan renja Perangkat Daerah, dalam rangka mencapai target indikator kinerja Renstra Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.
- 8) Menyampaikan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah, tentang kesesuaian antara rancangan Renja Perangkat Daerah dengan capaian target indikator kinerja Renstra Perangkat Daerah dan/atau Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. Sehingga apabila Renja Perangkat Daerah belum sesuai, maka dianjurkan Perangkat Daerah untuk menyempurnakannya.
- 9) Turut serta dalam pelaksanaan forum Perangkat Daerah pada lingkup Perangkat Daerah bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.
- 10) Melaksanakan verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah di kompilasi dengan usulan wilayah hasil forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.
- 11) Melaksanakan penyusunan rumusan dan analisis capaian program, kegiatan dan subkegiatan pada rancangan Renja Perangkat Daerah bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.
- 12) Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.
- 13) Turut serta dan memberi masukan dalam rapat pimpinan dan/atau rapat pembahasan tim teknis penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

- 14) Turut serta dan memberi masukan dalam penyusunan bahan ekspose Ketua Tim Penyusun Kepada Bupati.
 - 15) Melaporkan hasil kerja kepada Koordinator Bidang.
3. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan
- a. Ketua Kelompok Kerja
- 1) Mengkoordinasikan pengolahan data gambaran kondisi daerah yang mencakup aspek geografis dan demografis, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing fokus pada fasilitas wilayah/infrastruktur.
 - 2) Mengkoordinasikan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang diperoleh dari hasil rapat dengar pendapat dan penyerapan aspirasi melalui reses tahun sebelumnya, yang dikelompokkan kedalam urusan, program, kegiatan dan subkegiatan PD bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.
 - 3) Mengkoordinasi dan merumuskan usulan program, kegiatan dan subkegiatan dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
 - 4) Merumuskan permasalahan pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.
 - 5) Merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.
 - 6) Mengkoordinasikan dan menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan sesuai tanggungjawab dan tugas fungsi Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.
 - 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi usulan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas pada rancangan renja Perangkat Daerah, dalam rangka mencapai target indikator kinerja Renstra Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.
 - 8) Turut serta dalam pelaksanaan forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.
 - 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah di kompilasi dengan usulan wilayah hasil forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.
 - 10) Mengkoordinasikan perumusan dan analisis capaian program, kegiatan dan subkegiatan pada rancangan Renja Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.
 - 11) Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.
 - 12) Turut serta dan memberi masukan dalam rapat pimpinan dan/atau rapat pembahasan tim teknis penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
 - 13) Turut serta dan memberi masukan dalam penyusunan bahan ekspose Ketua Tim Penyusun Kepada Bupati.

- 14) Menelaah dan mengoreksi isi dan substansi Bab I,II,III,IV dan V dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
- 15) Melaporkan hasil kerja anggota kepada Ketua Tim Teknis Penyusunan.

b. Sekretaris

- 1) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan pengolahan data gambaran kondisi daerah yang mencakup aspek geografis dan demografis, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing fokus pada fasilitas wilayah/infrastruktur.
- 2) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang diperoleh dari hasil rapat dengar pendapat dan penyerapan aspirasi melalui reses tahun sebelumnya, yang dikelompokkan kedalam urusan, program, kegiatan dan subkegiatan PD bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.
- 3) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasi dan merumuskan usulan program, kegiatan dan subkegiatan dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
- 4) Membantu Ketua dalam Merumuskan permasalahan pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.
- 5) Membantu Ketua dalam Merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.
- 6) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan dan menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan sesuai tanggungjawab dan tugas fungsi Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.
- 7) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi usulan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas pada rancangan renja Perangkat Daerah, dalam rangka mencapai target indikator kinerja Renstra Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.
- 8) Turut serta dalam pelaksanaan forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.
- 9) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah di kompilasi dengan usulan wilayah hasil forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.
- 10) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan perumusan dan analisis capaian program, kegiatan dan subkegiatan pada rancangan Renja Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.
- 11) Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.

- 12) Turut serta dan memberi masukan dalam rapat pimpinan dan/atau rapat pembahasan tim teknis penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
- 13) Turut serta dan memberi masukan dalam penyusunan bahan ekspose Ketua Tim Penyusun Kepada Bupati.
- 14) Membantu Ketua dalam Menelaah dan mengkoreksi isi dan substansi Bab I,II,III,IV dan V dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
- 15) Membantu Ketua dalam Melaporkan hasil kerja anggota kepada Ketua Tim Teknis Penyusunan.
- 16) Mengelola sub kegiatan Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya didalam SIPD.

c. Anggota

- 1) Menyediakan dan membuat analisa/telaahan data dan informasi gambaran umum kondisi daerah mencakup aspek geografis dan demografis, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah fokus pada fasilitas/infrastruktur.
- 2) Melaksanakan inventarisasi jenis program, kegiatan subkegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang diperoleh dari hasil rapat dengar pendapat dan penyerapan aspirasi melalui reses tahun sebelumnya, bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.
- 3) Merekap dan melaporkan hasil inventarisasi jenis program, kegiatan dan subkegiatan yang diusulkan DPRD bahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
- 4) Melakukan perumusan permasalahan pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.
- 5) Melakukan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.
- 6) Melakukan penyelerasan prioritas dan sasaran pembangunan sesuai tanggungjawab dan tugas fungsi Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.
- 7) Melaksanakan verifikasi usulan program dan kegiatan prioritas pada rancangan renja Perangkat Daerah, dalam rangka mencapai target indikator kinerja Renstra Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.
- 8) Menyampaikan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah, tentang kesesuaian antara rancangan Renja Perangkat Daerah dengan capaian target indikator kinerja Renstra Perangkat Daerah dan/atau Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. Sehingga apabila Renja Perangkat Daerah belum sesuai, maka dianjurkan Perangkat Daerah untuk menyempurnakannya.
- 9) Turut serta dalam pelaksanaan forum Perangkat Daerah pada lingkup Perangkat Daerah bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.

- 10) Melaksanakan verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah di kompilasi dengan usulan wilayah hasil forum Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.
- 11) Melaksanakan penyusunan rumusan dan analisis capaian program, kegiatan dan subkegiatan pada rancangan Renja Perangkat Daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.
- 12) Turut serta dan memberi masukan dalam rapat pimpinan dan/atau rapat pembahasan tim teknis penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
- 13) Turut serta dan memberi masukan dalam penyusunan bahan ekspose Ketua Tim Penyusun Kepada Bupati.
- 14) Melaporkan hasil kerja kepada Koordinator Bidang.

IV. SEKRETARIAT

Koordinator

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi perkantoran (administrasi surat menyurat dan pendistribusiannya, penyediaan peralatan dan bahan tulis menulis, serta sarana prasarana) selama penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
2. Mengkoordinasikan penyediaan bahan untuk pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

BUPATI BANDUNG,



MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan RENJA Perangkat Daerah
Kabupaten Bandung

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun RENJA Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bandung	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD Kabupaten Bandung	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten Bandung		√		
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan		√		
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masingmasing Perangkat Daerah kabupaten sesuai surat edaran bupati.	√			

1	2	3	4	5	6
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten Bandung	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang telah disyahkan.	√			

Ciparay, Juni 2025

CAMAT CIPARAY

RACHMAT, S.IP, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19700109 199101 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CIPARAY

Jl. Pamagersari No.2 Ciparay Telp. 022 5950372 Email : kec.ciparay@bandungkab.go.id Website :
kec.ciparay.bandungkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR 000.9.2./512-Sekret

Dasar : 1. Peraturan Bupati Bandung No 93 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025
2. Keputusan Bupati Bandung Nomor : 008.1.1/KEP.131-BAPPERIDA/2024, tanggal 7 Maret 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

Nama : RACHMAT S.I.P., M.M.
Jabatan : CAMAT CIPARAY

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : **Terlampir**
Pangkat/Gol : Terlampir
NIP : Terlampir
Jabatan : Terlampir

Hari,Tanggal : Senin - Sabtu, 14 April 2025 s/d 28 Juni 2025
Tempat : Kecamatan Ciparay
Untuk : MENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN CIPARAY KABUPATENBANDUNG TAHUN 2025

Ditetapkan di Ciparay
Pada Tanggal 14 April 2025

CAMAT CIPARAY



RACHMAT S.I.P., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 197001091991011003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Lampiran 1

Nomor : 000.9.2./512-Sekret

Tanggal : 14 April 2025

Hal : Surat Perintah Tugas

DAFTAR TERLAMPIR

No	Daftar Telampir
1	EUIS RITA S.A.P. 196705012002122002 Penata Muda - III/a Sekretaris Kecamatan Ciparay
2	BUDI ADRIANSYAH A.MK 197907262007011004 Penata - III/c Kepala Sub Bagian Sub Bagian Program Dan Keuangan
3	SAEPULOH SKM 196909091995031002 Penata Tingkat I - III/d Kepala Seksi Pemerintahan
4	ANEU SITI NURJANAH S.E., M.M. 198206112014102001 Penata - III/c Kepala Seksi Pembangunan
5	R. LULU HELMINA TIRTA DILAGA ST 198209122010012002 Penata - III/c Kepala Seksi Sosial Budaya
6	SURYANA S.E. 197606092008011004 Penata - III/c Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
7	POPI SOPIANI S.S. 197707132014102002 Penata Muda - III/a Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Program Dan Keuangan
8	JUKHRUF SYAM JARUTA A.Md.T. 199305272020121004 Pengatur Tingkat I - II/d Pengolah Data Dan Informasi Sub Bagian Program Dan Keuangan

Verifikator
Nomor : 000.9.2./512-Sekret
Tanggal : 14 April 2025
Hal : Surat Perintah Tugas

DAFTAR VERIFIKATOR

No.	Tanggal Verifikasi	Verifikator	Status
1	2025-06-13 14:39:00	EUIS RITA S.A.P. PLT SEKRETARIS - KECAMATAN	

TC. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Bandung

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Ciparay

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	75,30	75,10	75,10	77,30	102,93	78,00	76,80	101,99
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100,00 %	100,00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 dok	9 dok	6 dok	6 dok	100,00	6 dok	21,00 dok	84,00
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7 dok	2 dok	2 dok	2 dok		2 dok	6,00 dok	85,71
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7 dok	2 dok	2 dok	2 dok		2 dok	6,00 dok	85,71
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7 dok	2 dok	2 dok	2 dok		2 dok	6,00 dok	85,71
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7 dok	2 dok	2 dok	2 dok		2 dok	6,00 dok	85,71
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26 lap	6 lap	6 lap	6 lap		6 lap	18,00 lap	69,23

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32 lap	11 lap	6 lap	6 lap	100,00	6 lap	23,00 lap	71,88
7	01	01	2.01	08	Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah						1 dok	1,00 dok	
7	01	01	2.01	09	pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat desa						56 data	56,00 data	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen keuangan	100	100	100	100	100	100	100	100,00
7		01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1212 orang /bulan	228 orang/bulan	228 orang/bulan	100,00	228 orang/bulan	984,00 orang/bulan	81,19
7		01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan				2 lap	2,00	50,00
7		01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 lap	lap	lap		6 lap	6,00 lap	50,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database	100		100	100	100,00	100	100,00 %	100,00
7		01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 dok	dok	dok		dok	- dok	-
7		01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 lap	4 lap	4 lap	100,00	4 lap	12,00 lap	75,00
7		01	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 lap	4 lap	4 lap	100,00	4 lap	8,00 lap	66,67
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80%	100							-
7		01	01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	38 paket				2 paket	2,00 paket	5,26
7		01	01	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9 dok	3 dok	3 dok	100,00	3 dok	6,00 dok	66,67

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	78 orang		25 orang	25 orang	100,00	40 orang	65,00 orang	83,33
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38 orang					23 orang	23,00 orang	60,53
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	97,03	100	98,02	98,02	100	98,35 %	98,35
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 paket	9 paket	4 paket	4 paket	100,00	5 paket	18,00 paket	85,71
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	99 paket	57 paket	28 paket	28 paket	100,00	29 paket	114,00 paket	115,15
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	75 paket	31 paket	18 paket	18 paket	100,00	20 paket	69,00 paket	92,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 paket	3 paket	2 paket	2 paket	100,00	1 paket	6,00 paket	35,29
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 dok					13 dok	13,00 dok	130,00
7	01	01	2.06	08	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitas kunjungan tamu	8 lap					4 lap	4,00 lap	50,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	648 lap	292 lap	200 lap	200 lap	100,00	296 lap	788,00 lap	121,60
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 %	100,00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	2 unit	15 unit	15 unit	100,00	4 unit	21,00 unit	105,00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit					2 unit	2,00 unit	50,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 %	100,00
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16 lap	1 lap	lap	lap		2 lap	3,00 lap	18,75

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 lap	14 lap	12 lap	12 lap	100,00	12 lap	38,00 lap	63,33
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 lap	84 lap	12 lap	12 lap	100,00	12 lap	108,00 lap	180,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 %	100,00
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit	21 unit	11 unit	11 unit	100,00	11 unit	43,00 unit	86,00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	4 unit	2 unit	2 unit	100,00	8 unit	14,00 unit	140,00
7	01	01	2.09	09	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit					1 unit	1,00 unit	50,00
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	2 unit	4 unit	4 unit	100,00	1 unit	7,00 unit	87,50
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit					1 unit	1,00 unit	50,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	90,00	89,97	89,97	89,97	100,00	89,98	89,97	99,97
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 %	100,00
7	01	01	2.00	01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100,00	1 lap	3,00 lap	75,00

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 dok					1 dok	1,00 dok	25,00
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	37 lap	11 lap	13 lap	13 lap	100,00	24 lap	48,00 lap	129,73
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 %	100,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.</i>	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 %	100,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 lap	3 lap	13 lap	13 lap	100,00	4 lap	20,00 lap	100,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi.</i>	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00 %	100,00
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 lembaga kemasy	8 lembaga kemasy	lembaga kemasy	lembaga kemasy			8,00 lembaga kemasy	200,00
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8 lap	3 lap	2 lap	2 lap	100,00	1 lap	6,00 lap	75,00
7	01	03	2.03	05	Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 lap	1 lap	2 lap	2 lap	100,00	1 lap	4,00 lap	80,00
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100					100		-
7	01	03	2.06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	200 keluarga					65 keluarga	65,00 keluarga	32,50

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	03	2.06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang MengikutPenumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	200 keluarga					65 keluarga	65,00 keluarga	32,50
7	01	03	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	200 keluarga					85 keluarga	85,00 keluarga	42,50
7	01	03	2.06	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	200 keluarga					85 keluarga	85,00 keluarga	42,50
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100,00	100	100,00 %	100,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	100	100	100	100	100,00	100	100,00 %	100,00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19 lap	1 lap	14 lap	14 lap	100,00	3 lap	18,00 lap	94,74
7	01	05	2.02	02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	21 lap	3 lap	12 lap	12 lap	100,00	4 lap	19,00 lap	90,48
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	100	100	100,00	100	100,00	100	100 %	100,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	17 lap	2 lap	12 lap	12 lap	100,00	2 lap	16,00 lap	94,12
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00 %	100,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.</i>	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00 %	100,00
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	766 orang	150 orang	200 orang	200 orang	100,00	295 orang	645,00 orang	84,20
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1743 orang	416 orang	600 orang	600 orang	100,00	540 orang	1.556,00 orang	89,27

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	05	2.01	05	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	4 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100,00	1 lap	3,00 lembaga	75,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.	40 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00	12 dokumen	36,00 dokumen	90,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00 %	100,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00 %	100,00
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2,00 dok					1 dok	1,00 dok	50,00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 dok	3 dok	4 dok	4 dok	100,00	2 dok	9,00 dok	128,57
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 dok					2 dok	2,00 dok	33,33
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	2 lap					1 lap	1,00 lap	50,00
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	11 dok	1 dok	dok	dok		dok	1,00 dok	9,09

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10 dok	4 dok	2 dok	2 dok	100,00	2 dok	8,00 dok	80,00
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 lap					1 lap	1,00 lap	50,00

Ciparay, 2 Januari 2025
CAMAT CIPARAY

RACHMAT, S.IP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 197001091991011003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CIPARAY TAHUN LALU	 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Ciparay	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ciparay	25
2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ciparay	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	46
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN CIPARAY	 48
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	48
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Ciparay	49
3.3 Program dan Kegiatan	58
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CIPARAY	 66
 BAB IV PENUTUP	 75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Ciparay merupakan perubahan rencana pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun ke depan yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 44 Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 138 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Rencana Kerja ini merupakan dasar dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Tahun 2025.

RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Kecamatan Ciparay, sesuai dengan rencana program prioritas pada RKPD. Renstra Kecamatan Ciparay menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD Tahun 2025 yang disusun ke dalam Renja Perubahan Kecamatan Ciparay Tahun 2025. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Kecamatan Ciparay berdasarkan pelaksanaan Renja Kecamatan Ciparay tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Renja Kecamatan Ciparay dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ciparay.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Ciparay Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 138 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025;
23. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.467-Tapem/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.615-KSOTDA/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat;
24. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Ciparay adalah untuk memberikan acuan awal bagi Kecamatan Ciparay dalam menyusun perubahan program dan kegiatan, menentukan lokasi kegiatan, menyusun indikator kegiatan, kelompok sasaran kegiatan dalam periode satu tahun pada tahun yang akan datang. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan melalui perencanaan terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan Kabupaten Bandung.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ciparay Tahun 2025 disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Kecamatan Ciparay, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang pengertian, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD dan Renstra serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RKA

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan penjelasan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan lain yang mengatur SOTK, kewenangan Kecamatan Ciparay, serta pedoman yang dijadikan acuan

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Ciparay

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Ciparay serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CIPARAY TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Kecamatan Ciparay

Menggambarkan kajian terhadap hasil evaluasi Renja Kecamatan Ciparay Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ciparay

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ciparay berdasarkan indicator kinerja

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ciparay

Berisikan uraian mengenai: sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Ciparay dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Ciparay, permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Ciparay, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Ciparay, formulais isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dialukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan pemangku kepentingan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN CIPARAY

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait tupoksi Kecamatan Ciparay

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Ciparay

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ciparay yang diaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Ciparay

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dna kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CIPARAY

Menjelaskan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CIPARAY TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Ciparay

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 khususnya Kecamatan Ciparay berupa perbandingan Rencana Kerja Kecamatan Ciparay tahun 2024 dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2024 dari segi lokasi kegiatan, capaian target kinerja dan jumlah anggaran/dana meliputi: *Belanja Kewilayahan dan Belanja Penunjang*. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara Rencana Kerja dengan RKA tahun yang sama, sehingga dapat dilakukan tidak lanjut berupa revisi pada penyusunan Renja tahun berikutnya, bila terjadi ketidaksesuaian.

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan.

Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kecamatan Ciparay khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Selanjutnya keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan

berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Ciparay telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kinerja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung ditunjang dengan Belanja barang jasa, belanja pegawai dan belanja modal dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.103.596.868	4.665.749.823	91,42
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.832.000	21.316.400	66,97
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.300.000	10.689.600	74,75
Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA-SKPD	1.168.000	1.168.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.168.000	1.168.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.168.000	828.000	70,89
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.168.000	658.000	56,34
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.860.000	5.144.800	47,37
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.660.000	83,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.326.737.488	3.944.088.479	91,16
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.326.737.488	3.944.088.479	91,16
Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.059.940	133.808.171	89,17
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.751.000	6.751.000	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.003.800	79.884.801	99,85
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.490.140	2.482.370	99,69
Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	700.000	700.000	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.115.000	43.990.000	73,18
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326.197.440	310.537.067	95,20
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.708.440	40.646.386	74,30
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	271.489.000	269.890.681	99,41
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.500.000	1.179.800	78,65
Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	500.000	499.800	99,96
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000	680.000	68,00
Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	24.488.500	24.408.800	99,67
Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	500.000	499.800	99,96
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	23.988.500	23.909.000	99,67
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.180.500	17.070.000,00	99,36
Pengadaan Mebel	17.180.500	17.070.000,00	99,36
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.601.000	213.341.106	94,57
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.680.000	43.071.700	78,77
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.720.000	2.680.000	98,53
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	168.201.000	167.589.406	99,64
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	469.675.000	465.125.220	99,03
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.900.000	3.846.000	98,62
Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	1.950.000	1.914.000	98,15
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.950.000	1.932.000	99,08
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	7.334.600	7.268.200	99,09
Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	3.250.000	3.220.000	99,08

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	4.084.600	4.048.200	99,11
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	49.529.000	49.367.400	99,67
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	49.529.000	49.367.400	99,67
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	408.911.400	404.643.620	98,96
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	408.911.400	404.643.620	98,96
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	121.672.000	120.653.799	99,16
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	121.672.000	120.653.799	99,16
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30.692.000	30.501.100	99,38
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	62.360.000	61.622.699	98,82
Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	3.424.000	3.394.000	99,12
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25.196.000	25.136.000	99,76
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	61.972.666	59.619.837	96,20
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	46.814.666	46.440.637	99,20
Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	20.878.666	20.801.437	99,63
Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	25.936.000	25.639.200	98,86
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15.158.000	13.179.200	86,95
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	15.158.000	13.179.200	86,95
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	277.022.000	276.254.800	99,72
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	205.307.000	204.719.400	99,71

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	205.307.000	204.719.400	99,71
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	71.715.000	71.535.400	99,75
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	57.372.000	57.226.000	99,75
Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	14.343.000	14.309.400	99,77
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	80.910.098	80.013.600	98,89
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80.910.098	80.013.600	98,89
Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	56.480.169	55.944.000	99,05
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	24.429.929	24.069.600	98,53
JUMLAH	6.114.848.632	5.667.417.079	92,68

Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Realisasi Program yang menunjang terhadap kinerja utama memberikan gambaran:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Di Tahun ini ada 1 sub kegiatan dalam kinerjanya tidak tercapai 100%, yaitu sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Hal ini dikarenakan adanya perjalanan dinas yang tidak sesuai perencanaan dalam pelaksanaannya baik dari segi waktu dan tempat kegiatannya sehingga anggaran tidak terserap.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Secara keseluruhan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan tidak ada yang melebihi target yang telah ditetapkan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Semua program/kegiatan dan sub kegiatan semuanya tercapai. Hal ini dikarenakan koordinasi yang baik antar dan intern kecamatan dengan dinas terkait serta desa. Di samping itu factor lainnya adalah kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Capaian Kinerja di Kecamatan Ciparay yang secara keseluruhan mencapai 100% tentu ada akan ada implikasi positif terhadap Renstra. Penyelenggaraan perencanaan Renja sesuai Renstra dalam sisi kinerja walaupun terdapat perubahan anggaran berjalannya waktu/tahun Renja.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut.

Meminimalisir perubahan anggaran yang mendekati akhir tahun anggaran bisa memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program kegiatan.

Berikut tabel realisasi kinerja Kecamatan Ciparay:

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Nilai AKIP	Poin	75,10	77,30	102,93
2.	Prosentase BMD dalam kondisi baik	Persen	80,93	81,47	100,67
3.	Nilai IKM	Poin	89,98	89,98	100,00
4.	Jumlah desa yang cepat berkembang	desa	2	2	100,00

Untuk pencapaian nilai AKIP di tahun 2024, Kecamatan Ciparay mendapat nilai 77,30 atau capaiannya 102,93% dari target yang ditentukan. Peningkatan ini dikarenakan salah satunya yaitu meningkatnya kinerja Kecamatan Ciparay. Aset yang ada di kecamatan Ciparay 81,47% dalam kondisi baik untuk tahun 2024. Kondisi asset melebihi dengan target yang diharapkan karena adanya sensus barang di tahun 2024 maka sebagian barang yang sudah rusak berat telah dihapuskan.

Untuk pencapaian kinerja, evaluasi juga dilakukan terhadap hasil Rencana Kerja Kecamatan Ciparay Tahun 2024, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

TC. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Bandung

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Ciparay

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) // Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	75,30	75,10	75,10	77,30	102,93	78,00	76,80	101,99
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100,00 %	100,00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 dok	9 dok	6 dok	6 dok	100,00	6 dok	21,00 dok	84,00
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7 dok	2 dok	2 dok	2 dok		2 dok	6,00 dok	85,71
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7 dok	2 dok	2 dok	2 dok		2 dok	6,00 dok	85,71
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7 dok	2 dok	2 dok	2 dok		2 dok	6,00 dok	85,71
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7 dok	2 dok	2 dok	2 dok		2 dok	6,00 dok	85,71
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26 lap	6 lap	6 lap	6 lap		6 lap	18,00 lap	69,23

7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32 lap	11 lap	6 lap	6 lap	100,00	6 lap	23,00 lap	71,88
7	01	01	2.01	08	Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah						1 dok	1,00 dok	
7	01	01	2.01	09	pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat desa						56 data	56,00 data	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen keuangan	100	100	100	100	100	100	100	100,00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1212 orang/bulan	528 orang/bulan	228 orang/bulan	228 orang/bulan	100,00	228 orang/bulan	984,00 orang/bulan	81,19
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan					2 lap	2,00	50,00
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 lap	lap	lap	lap		6 lap	6,00 lap	50,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database	100		100	100	100,00	100	100,00 %	100,00
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 dok	dok	dok	dok		dok	- dok	-
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 lap	4 lap	4 lap	4 lap	100,00	4 lap	12,00 lap	75,00
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 lap		4 lap	4 lap	100,00	4 lap	8,00 lap	66,67
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80%	100							-
7	01	01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	38 paket					2 paket	2,00 paket	5,26
7	01	01	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9 dok		3 dok	3 dok	100,00	3 dok	6,00 dok	66,67

7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	78 orang		25 orang	25 orang	100,00	40 orang	65,00 orang	83,33
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38 orang					23 orang	23,00 orang	60,53
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	97,03	100	98,02	98,02	100	98,35 %	98,35
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 paket	9 paket	4 paket	4 paket	100,00	5 paket	18,00 paket	85,71
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	99 paket	57 paket	28 paket	28 paket	100,00	29 paket	114,00 paket	115,15
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	75 paket	31 paket	18 paket	18 paket	100,00	20 paket	69,00 paket	92,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 paket	3 paket	2 paket	2 paket	100,00	1 paket	6,00 paket	35,29
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 dok					13 dok	13,00 dok	130,00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu	8 lap					4 lap	4,00 lap	50,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	648 lap	292 lap	200 lap	200 lap	100,00	296 lap	788,00 lap	121,60
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 %	100,00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	2 unit	15 unit	15 unit	100,00	4 unit	21,00 unit	105,00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit					2 unit	2,00 unit	50,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 %	100,00
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16 lap	1 lap	lap	lap		2 lap	3,00 lap	18,75

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 lap	14 lap	12 lap	12 lap	100,00	12 lap	38,00 lap	63,33
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 lap	84 lap	12 lap	12 lap	100,00	12 lap	108,00 lap	180,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 %	100,00
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit	21 unit	11 unit	11 unit	100,00	11 unit	43,00 unit	86,00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	4 unit	2 unit	2 unit	100,00	8 unit	14,00 unit	140,00
7	01	01	2.09	09	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit					1 unit	1,00 unit	50,00
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	2 unit	4 unit	4 unit	100,00	1 unit	7,00 unit	87,50
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit					1 unit	1,00 unit	50,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	90,00	89,97	89,97	89,97	100,00	89,98	89,97	99,97
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 %	100,00
7	01	01	2.00	01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100,00	1 lap	3,00 lap	75,00

7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100,00	1 dok	4,00 dok	80,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100,00
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 dok					1 dok	1,00 dok	50,00
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100,00	1 lap	3,00 lap	75,00
7	01	03	2.03	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100,00	1 lap	3,00 lap	75,00
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.	100	100	100	100	100,00	100	100,00 %	100,00
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	9 dok	3 dok	4 dok	2 dok	50,00	4 dok	9,00 dok	100,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan.	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 %	100,00

7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 dok					1 dok	1,00 dok	25,00
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	37 lap	11 lap	13 lap	13 lap	100,00	24 lap	48,00 lap	129,73
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 %	100,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 %	100,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 lap	3 lap	13 lap	13 lap	100,00	4 lap	20,00 lap	100,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi.	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00 %	100,00
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 lembaga kemasy	8 lembaga kemasy	lembaga kemasy	lembaga kemasy			8,00 lembaga kemasy	200,00
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8 lap	3 lap	2 lap	2 lap	100,00	1 lap	6,00 lap	75,00
7	01	03	2.03	05	Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 lap	1 lap	2 lap	2 lap	100,00	1 lap	4,00 lap	80,00
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100					100		-
7	01	03	2.06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	200 keluarga					65 keluarga	65,00 keluarga	32,50

7	01	03	2.06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang MengikutPenumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	200 keluarga						65 keluarga	65,00 keluarga	32,50
7	01	03	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	200 keluarga						85 keluarga	85,00 keluarga	42,50
7	01	03	2.06	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	200 keluarga						85 keluarga	85,00 keluarga	42,50
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100,00	100	100,00 %	100,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	100	100	100	100	100,00	100	100,00 %	100,00	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19 lap	1 lap	14 lap	14 lap	100,00	3 lap	18,00 lap	94,74	
7	01	05	2.02	02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	21 lap	3 lap	12 lap	12 lap	100,00	4 lap	19,00 lap	90,48	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	100	100	100,00	100	100,00	100	100 %	100,00	

7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	17 lap	2 lap	12 lap	12 lap	100,00	2 lap	16,00 lap	94,12
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00 %	100,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00 %	100,00
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	766 orang	150 orang	200 orang	200 orang	100,00	295 orang	645,00 orang	84,20
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1743 orang	416 orang	600 orang	600 orang	100,00	540 orang	1.556,00 orang	89,27

7	01	05	2.01	05	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	<i>Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>	4 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100,00	1 lap	3,00 lembaga	75,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.</i>	40 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00	12 dokumen	36,00 dokumen	90,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00 %	100,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase desa yang dibina.</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00 %	100,00
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	2,00 dok					1 dok	1,00 dok	50,00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 dok	3 dok	4 dok	4 dok	100,00	2 dok	9,00 dok	128,57
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	6 dok					2 dok	2,00 dok	33,33
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	2 lap					1 lap	1,00 lap	50,00
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	11 dok	1 dok	dok	dok		dok	1,00 dok	9,09

7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10 dok	4 dok	2 dok	2 dok	100,00	2 dok	8,00 dok	80,00
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 lap					1 lap	1,00 lap	50,00

Kinerja Renstra berdasarkan periode 4 tahun Renstra tercapai cukup optimal dan sesuai target. Hal ini dikarenakan adanya kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan semua program, kegiatan dan sub kegiatan. Dapat dilihat pada capaian nilai AKIP tahun 2024, Kecamatan Ciparay mendapat nilai 77,30 dari target 75,10 poin. Untuk nilai IKM Kecamatan Ciparay juga mendapat poin sesuai terget yaitu 89,98 poin. Pendukung keberhasilan ini antara lain semakin maksimalnya pelayanan prima kepada masyarakat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ciparay

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses sampaikan dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan.

Pencapaian Kinerja Kecamatan Ciparay selama tahun 2024 dalam berbagai bidang baik bidang pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, Pendapatan Asli Daerah, maupun pembangunan infrastruktur hasil Musrenbang, yaitu:

1. Pada bidang Pemerintahan, telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:
 - Sosialisasi perencanaan dan pengelolaan keuangan desa
 - Pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa
 - Sosialisasi BPD
 - Sosialisasi SOTK
 - Sosialisasi RT/RW
 - Melaksanakan rapat rutin bulanan (ABPEDNAS)
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi Bunga Desa, BKK, DD, ADPD
 - Pembinaan Musdes RPJMDES
 - Monitoring dan evaluasi dana BKK Bunga Desa, Bantuan Provinsi dan BKK Rembug Bedas
 - Monitoring kegiatan BLT
 - Rapat Koordinasi Forkopimcam Tingkat Kecamatan Ciparay
 - Monitoring tahapan-tahapan dan pelaksanaan Pilkada

- Rembug Bedas di Desa Gunungleutik
- Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Ciparay
- Monitoring, evaluasi dan pembinaan administrasi BPD
- Rakor pendataan indikator standar pelayanan masyarakat Tingkat Kecamatan Ciparay
- Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan
- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan asset desa
- Sosialisasi SOTK Desa, RT/RW, BPD
- Sosialisasi Pilkada
- Melaksanakan Monev ADPD ke desa-desa
- Melaksanakan pembinaan pada kegiatan musyawarah RKPDES se Kecamatan Ciparay
- Melaksanakan sosialisasi 13 Program Bupati Bandung
- Pembinaan perangkat desa
- Rapat koordinasi dan rapat evaluasi kegiatan pemerintahan
- Pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa
- Pelayanan bedas digital service

2. Pada bidang Sosial dan Budaya

Pada tahun 2024 ini di bidang sosial budaya telah dilaksanakan berbagai kegiatan berupa:

- Sosialisasi Pendidikan, peran Pendidikan kesetaraan (paket A,B,C) dalam menanggulangi warga masyarakat putus sekolah
- Sosialisasi kepemudaan, mengembangkan kewirausahaan bagi generasi muda
- Monitoring kegiatan BLT
- Penyerahan bantuan dari Baznas Kabupaten Bandung
- Peringatan Hari Santri nasional
- Rapat Koordinasi Forkopimcam Tingkat Kecamatan Ciparay
- Bina wilayah Karang Taruna se Kecamatan Ciparay
- Rembug Bedas di Desa Gunungleutik
- Peringatan HUT RI dan HUT Kabupaten Bandung
- Kegiatan Donor Darah

- Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Ciparay
- Sosialisasi sertifikat halal non hewani
- Melaksanakan Monev ADPD ke desa-desa
- Pelaksanaan hari-Hari bersejarah
- Melaksanakan sosialisasi 13 Program Bupati Bandung
- Mengikuti kegiatan Festival olah raga tradisional
- Melaksanakan Gelar Budaya
- Fasilitasi penyerahan bantuan bagi korban bencana
- pelaksanaan Hari-Hari Besar Islam tingkat Kecamatan
- Sosialisasi Kepemudaan dan Kependidikan

3. Pada Bidang Pembangunan, telah melaksanakan kegiatan-kegiatan, diantaranya:

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi Bunga Desa, BKK, DD, ADPD Tahap II dan III
- Pembinaan Musdes RPJMDES
- Pembersihan titik sampah/sampah liar
- Sosialisasi tata Kelola sarana dan prasarana desaPeningkatan kapasitas pemerintahan desa dan Lembaga desa
- Monitoring dan evaluasi dana BKK Bunga Desa, Bantuan Provinsi dan BKK Rembug Bedas
- Rapat Koordinasi Forkopimcam Tingkat Kecamatan Ciparay
- Rembug Bedas di Desa gunungleutik
- Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Ciparay
- Rapat koordinasi revitalisasi Pasar Desa Ciparay
- Pembinaan dalam rangka penilaian BBGRM Tingkat Kabupaten Bandung
- Musrenbang Tingkat Kecamatan Ciparay
- Melaksanakan Monev ADPD ke desa-desa
- Melaksanakan sosialisasi 13 Program Bupati Bandung
- Melaksanaan pembinaan pada kegiatan musyawarah RKPDES se Kecamatan Ciparay melaksanakan pembinaan dan monitoring serta evaluasi terhadap bantuan-bantuan seperti ADPD, raksa desa, bantuan gubernur dan Dana Desa

ke desa-desa, terutama kegiatan fisik dan laporan pertanggung jawaban (SPJ)

- Mendampingi, mengawasi kegiatan para kader lingkungan dalam kegiatan hariannya
- Monitoring penyaluran bantuan dari pusat, gubernur, bupati, BST, BTT, bansos
- Bimbingan teknis pengelolaan sampah dan bank sampah

4. Pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Ciparay kondisi ketentraman dan ketertiban selama ini berjalan cukup aman, lancar dan tertib berkat adanya koordinasi yang baik dan terpadu antar Pemerintahan Kecamatan, Polsek dan Koramil setempat serta Kasi terkait. Selain hal tersebut di atas, kerja sama dan koordinasi tersebut dalam rangka meningkatkan keamanan lingkungan dan pencegahan kejahatan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kejadian yang mengganggu keamanan dan ketertiban, akan tetapi berhasil ditangani dengan baik.

Beberapa langkah yang telah diambil dalam usaha memelihara ketentraman dan ketertiban, antara lain:

- Melaksanakan sosialisasi mitigasi bencana
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi Bunga Desa, BKK, DD, ADPD
- Pembersihan titik sampah/sampah liar
- Turnamen Sepakbola Linmas desa
- Sosialisasi gempur rokok ilegal dalam rangka menjaga trantibum wilayah Kabupaten Bandung
- Monitoring kegiatan BLT
- Rapat Koordinasi Forkopimcam Tingkat Kecamatan Ciparay
- Rembug Bedas di Desa Gunungleutik
- Sosialisasi penanganan konflik internal Tingkat Kecamatan Ciparay
- Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Ciparay
- Sosialisasi Rokok Ilegal kepada warung dna took se Kecamatan Ciparay

- Rapat koordinasi revitalisasi Pasar Desa Ciparay
- Melaksanakan Monev ADPD ke desa-desa
- Melaksanakan pembinaan pada kegiatan musyawarah RKPDES se Kecamatan Ciparay
- Melaksanakan sosialisasi 13 Program Bupati Bandung
- Monitoring penyaluran bantuan dari pusat, gubernur, bupati, BST, BTT, bansos
- Pemantauan kegiatan pasar tumpah di wilayah Kecamatan Ciparay
- Operasi miras ke desa-desa

5. Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu telah melaksanakan kegiatan, sebagai berikut:

- Sosialisasi Pengembangan usaha Ekonomi Masyarakat untuk meningkatkan pemasaran produk UMKM
- Sosialisasi Gerakan keluarga sehat, tanggap dan Tangguh bencana
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi Bunga Desa, BKK, DD, ADPD Tahap II dan III
- Pembinaan Musdes RPJMDES
- Pemutkahiran SGDs Anggaran DD Tahap II
- Lokakarya Triwulan IV bersama PKM
- Sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG)
- Monitoring posyandu
- Jambore kader PKK
- Sosialisasi Gerakan keluarga sehat tanggap dan Tangguh bencana
- Monitoring dan evaluasi dana BKK Bunga Desa, Bantuan Provinsi dan BKK Rembug Bedas
- Monitoring kegiatan BLT
- Rapat Koordinasi Forkopimcam Tingkat Kecamatan Ciparay
- Peningkatan kapasitas kader posyandu
- Monitoring pemberian vitamin A ke posyandu se Kecamatan Ciparay

- Monitoring dan evaluasi program inovasi Bermadu ke desa-desa
- Rembug Bedas di Desa Gunungleutik
- Pelaksanaan Rembug stunting
- Penyuluhan pola asuh anak kepada orang tua serta melakukan pembinaan kepada guru PAUD
- Lomba Cipta Menu PKK dan Lomba Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Tingkat Kecamatan Ciparay
- Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Ciparay
- Melaksanakan monev Bermadu Posyandu di desa-desa
- Bunga Desa di Desa Mekarlaksana
- Melaksanakan Monev ADPD ke desa-desa
- Melaksanaan pembinaan pada kegiatan musyawarah RKPDES se Kecamatan Ciparay
- Melaksanakan sosialisasi 13 Program Bupati Bandung
- Pelaksanaan pelatihan penguatan kapasitas SDM kader posyandu

Kaitan dengan kegiatan di berbagai bidang yang menunjang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ciparay, berdasarkan Renstra Perubahan, berikut diuraikan dalam table di bawah ini:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ciparay

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	Nilai AKIP			72,00	75,20	75,30	80,00	77,30		75,30	80,00	
2	Persentase BMD dalam kondisi baik			80,93%	81,13%	82,51%	82,62%	81,47%		82,51%	82,62%	
3	Nilai IKM			89,98	89,99	90,00	90,00	89,98		90,00	90,00	
4	Jumlah desa cepat berkembang			2	2	1	2	2		1	2	

Kaitan dengan capaian target kinerja yang telah terlampaui di tahun 2024, maka untuk target capaian tahun-tahun selanjutnya akan mengalami perubahan disesuaikan dengan capaian tahun 2024. Data target pada tahun 2024 masih dalam target Renstra. Namun untuk kaitan dengan Nilai AKIP, karena di tahun 2024 telah melebihi realisasinya, maka di tahun 2025 dan seterusnya

mengalami penyesuaian target Nilai AKIP. Di tahun 2024, nilai AKIP Kecamatan Ciparay sebesar 77,30. Berikut adalah target kinerja berdasarkan hasil capaian di tahun sebelumnya:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ciparay

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	Nilai AKIP			72,00	78,00	78,50	79,00	77,30		78,50	80,00	
2	Persentase BMD dalam kondisi baik			80,93%	81,13%	82,51%	82,62%	81,47%		82,51%	82,62%	
3	Nilai IKM			89,98	89,99	90,00	90,00	89,98		90,00	90,00	
4	Jumlah desa cepat berkembang			2	2	1	2	2		1	2	

Dalam kaitan dengan PAD, di tahun 2024 kecamatan tidak lagi melaksanakan penerimaan PAD, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta Surat Edaran Kemendagri Nomor 011/5976/SJ tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perijinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ciparay

1. Kinerja Kecamatan Ciparay

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Ciparay telah berjalan sesuai dengan perencanaan meskipun masih terdapat kekurangan, sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi intern telah dilaksanakan rapat koordinasi setiap bulannya untuk memastikan capaian kinerja dan mengatasi atau merumuskan solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan sebagai resiko pelaksanaan pelayanan menuju ke arah yang lebih baik. Selain kegiatan tersebut di atas, Kecamatan Ciparay juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program-

program prioritas Bupati Bandung, yakni: rembug stunting, fasilitasi penyaluran bantuan bagi warga miskin dan operasi Pasar Murah dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrim.

Hal-hal kritis kaitan dengan pelayanan ;

- a. Melaksanakan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat Ciparay berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah, dimana dalam pelaksanaannya kewenangan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Untuk pelaksanaan kewenangan Kecamatan Ciparay yang tertuang dalam Renja yang merupakan urusan wajib adalah kesehatan, lingkungan hidup, kepemudaan dan olahraga, koperasi dan usaha kecil menengah, Administrasi kependudukan dan catatan sipil, sosiali, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanian, pariwisata, kebudayaan, dan pertanahan.
- b. Melaksanakan Pelayanan Publik langsung terhadap Masyarakat antara lain:
 1. Non Perizinan/Administrasi Kependudukan dan lainnya
 2. Memberikan rekomendasi terhadap proposal ataupun pelayanan lainnya
 3. Melaksanakan Program Kewilayahan
 4. Menindaklanjuti laporan dan keluhan Masyarakat kaitan dengan Pelayanan
 5. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. (SKM) guna mengetahui tingkat Kepuasan Masyarakat melalui Kusioner SKM Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. Permasalahan dan Hambatan

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagai Implementasi dari Tugas Kecamatan secara umum tidak terlepas

dari adanya kendala dan Hambatan yang merupakan satu kesatuan yang perlu adanya penanganan untuk memberikan arah kebijakan yang akan diambil guna terlaksananya program kegiatan sesuai dengan target kinerja maupun target dari pagu anggarannya.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Kecamatan Ciparay mengidentifikasi beberapa permasalahan di beberapa bidang, diantaranya adalah:

1. Kurangnya kuantitas sumber daya aparatur
2. Belum optimalnya kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat
3. Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan sampah
4. Belum maksimalnya budaya gotong royong dan kesetiakawanan social
5. Sarana dan Prasarana pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas yang ada di Kecamatan Ciparay masih kurang.
6. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat belum maksimal.

Melihat permasalahan di atas, Kecamatan Ciparay melakukan upaya penanganan, antara lain:

1. Mengajukan permohonan penambahan sumber daya aparatur serta mengoptimalkan sumber daya aparatur yang ada
2. Memaksimalkan kerjasama dengan aparat keamanan terutama dengan polsek dan koramil
3. Sosialisasi penanganan masalah sampah ke masyarakat serta perbaikan manajemen bagi pengelolaan sampah di Kecamatan Ciparay
4. Meningkatkan kegiatan Jumsih, pelaksanaan BBGRM
5. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan kecamatan
6. Memaksimalkan peran kecamatan sebagai Perangkat Daerah dengan mengimplementasikan petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis mengenai pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat

Hambatan :

- a. Sarana dan Prasarana (perlu perbaikan dan penambahan)
- b. SPIP dalam Pelaksanaan Pelayanan belum terlaksana dengan baik

3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Adanya permasalahan dan hambatan yang ada terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sangat berpengaruh meskipun permasalahan dan hambatan tersebut bisa diatasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi intern secara terus menerus dan rutin dilaksanakan setiap bulan dan apabila ada permasalahan dan hambatan, semua aparatur untuk turut membantu dan memberikan pendampingan terhadap permasalahan yang ada, sehingga program kegiatan berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian permasalahan dan hambatan tersebut perlu penanganan

4. Tantangan dan Peluang.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak terlepas dari adanya tantangan, baik tantangan dari internal maupun eksternal, baik tantangan yang sudah terprediksi maupun tantangan yang tidak terprediksi.

Adapun tantangan tersebut adalah

A. Tantangan

1) Internal

- a. SDM Aparatur yang masih perlu adanya peningkatan kuantitas dalam rangka peningkatan pelayanan prima
- b. penunjang kerja yang perlu perbaikan dan peningkatan

2) Eksternal

- a. masih rendahnya tingkat pemahaman Masyarakat terhadap Pelayanan yang ada di Kecamatan
- b. rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan
- c. Rendahnya masyarakat dalam menciptakan Lingkungan yang bersih dan Sehat
- d. Pelimpahan Kewenangan urusan Pemerintahan dari Bupati kecamatan yang perlu pembaharuan disesuaikan dengan potensi masing-masing Kecamatan

B. Peluang

- 1) Adanya Dukungan Anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
- 2) Sarana dan Prasarana Kecamatan (meskipun masih perlu peningkatan Kualitas dan kapasitasnya)
- 3) Semangat dan Komitmen Aparatur Kecamatan sangat tinggi untuk mendukung Kecamatan Ciparay yang lebih maju dan semakin baik.
- 4) Trend Positif Kinerja Aparatur Kecamatan Ciparay
- 5) Kegiatan Musrenbang telah berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

5. Formulasi isu-isu penting

Formulasi isu-isu penting sebagai tindak lanjut dari adanya permasalahan, Tantangan dan peluang merupakan satu kesatuan dan satu rangkaian untuk memberikan catatan strategis atau rekomendasi untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun yang direncanakan antara lain:

1. Kurangnya kuantitas sumber daya aparatur
2. Belum optimalnya kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat
3. Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan sampah
4. Belum maksimalnya budaya gotong royong dan kesetiakawanan social

5. Sarana dan Prasarana pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas yang ada di Kecamatan Ciparay masih kurang.
6. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat belum maksimal.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indicator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

1. Perbandingan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

Membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Rencana Rencana Kerja Tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan.

Tim Penyusun Renja di Tingkat Kecamatan melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan.

Melakukan Koordinasi untuk merumuskan perencanaan Tahun berikutnya dengan acuan rancangan awal RKPD dan melakukan penelaahan terhadap Permasalahan yang ada dan merupakan Prioritas untuk dilaksanakan,

2. Alasan Pelaksanaan analisis kebutuhan

Untuk menjamin agar perencanaan sesuai dengan permasalahan yang ada maka perlu dilakukannya analisis kebutuhan dari berbagai bidang secara keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana pagu yang telah ada.

Harapannya tentu dalam pelaksanaannya tidak terjadi pengadaan atau pelaksanaan kegiatan diluar kebutuhan

3. Temuan-temuan dan catatan penting setelah analisis kebutuhan
Setelah dilaksanakan analisis kebutuhan, maka terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Hal itu dikarenakan penyesuaian program kegiatan terutama kaitan dengan prioritas program Bupati Bandung.
4. Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan, sebagai berikut:

Tabel TC.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Bandung

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Ciparay

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Ciparay	Nilai AKIP	74,20	4.330.227.078,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Ciparay	Nilai AKIP	78,00	5.892.486.154,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Ciparay	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	10.900.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Ciparay	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	27.378.926,00	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	1.500.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	12.707.500,00	
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	700.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.316.000,00	
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.316.000,00	
d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	900.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.316.000,00	
e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.316.000,00	
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	1.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	6.050.000,00	
g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	800.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	1.620.000,00	
h	Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	2.000.000,00	Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	883.326,00	

i	pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	Kec. Ciparay	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	56 data	2.000.000,00	pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	Kec. Ciparay	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	56 data	854.100,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Ciparay	Persentase ketersediaan dokumen keuangan	100%	3.891.763.698,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Ciparay	Persentase ketersediaan dokumen keuangan	100%	4.604.025.764,00	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ciparay	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228 orang/bulan	3.890.763.698,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ciparay	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228 orang/bulan	4.602.705.764,00	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	660.000,00	
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6 laporan	500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6 laporan	660.000,00	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Ciparay	Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80%	100%	31.451.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Ciparay	Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80%	100%	106.468.000,00	
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Ciparay	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	19 paket	9.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Ciparay	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	24.000.000,00	
b	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 dokumen	500.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 dokumen	949.400,00	
c	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ciparay	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	19 orang	16.951.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ciparay	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	40.759.300,00	
d	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ciparay	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19 orang	5.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ciparay	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23 orang	40.759.300,00	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Ciparay	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	29.900.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Ciparay	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	219.824.599,00	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Ciparay	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Ciparay	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	7.251.000,00	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Ciparay	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	14.250.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Ciparay	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 paket	142.862.950,00	
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Ciparay	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	1.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Ciparay	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 paket	11.510.649,00	

d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Ciparay	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	150.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Ciparay	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	850.000,00	
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dokumen	1.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 dokumen	9.900.000,00	
f	Fasilitas kunjungan tamu	Kec. Ciparay	Jumlah laporan Fasilitas kunjungan tamu	4 laporan	1.000.000,00	Fasilitas kunjungan tamu	Kec. Ciparay	Jumlah laporan Fasilitas kunjungan tamu	4 laporan	6.500.000,00	
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	12.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	296 laporan	40.950.000,00	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Ciparay	Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah	100%	306.602.380,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Ciparay	Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah	100%	326.819.061,00	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	1.400.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	2.800.000,00	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	54.013.380,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	40.810.861,00	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	251.189.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	283.208.200,00	
6	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Ciparay	Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database	100%	1.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Ciparay	Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database	100%	620.000,00	
a	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	500.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	310.000,00	
b	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kec. Ciparay	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	500.000,00	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kec. Ciparay	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	310.000,00	
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Ciparay	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100%	8.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Ciparay	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100%	59.983.500,00	
a	Pengadaan Mebel	Kec. Ciparay	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	3.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kec. Ciparay	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	50.186.200,00	
b	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kec. Ciparay	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	5.000.000,00	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kec. Ciparay	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	9.797.300,00	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Ciparay	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	50.610.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Ciparay	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	547.366.304,00	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Ciparay	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	41.930.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Ciparay	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	74.580.000,00	
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Ciparay	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	2.680.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Ciparay	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	5.240.000,00	

c	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Ciparay	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	2.000.000,00	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Ciparay	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	467.546.304,00	
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Ciparay	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	2.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Ciparay	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0,00	
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Ciparay	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	2.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Ciparay	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0,00	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Ciparay	Nilai IKM	89,99	323.500.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Ciparay	Nilai IKM	89,99	437.130.414,00	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Ciparay	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	100%	6.500.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Ciparay	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	100%	10.000.000,00	
a	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	3.250.000,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	5.000.000,00	
b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	3.250.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	5.000.000,00	
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Ciparay	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan.	100%	12.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Ciparay	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan.	100%	69.602.948,00	
a	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	2.000.000,00	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	4.107.400,00	
b	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	5.000.000,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	7.750.248,00	
c	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	5.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	57.745.300,00	

3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Ciparay	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.	100%	20.000.000,00	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Ciparay	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.	100%	52.000.000,00	
a	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	20.000.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	52.000.000,00	
4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Ciparay	Persentase Urusan pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan.	100%	285.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Ciparay	Persentase Urusan pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan.	100%	305.527.466,00	
a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 dokumen	5.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 dokumen	4.985.766,00	
b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10 laporan	280.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	21 laporan	300.541.700,00	
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Ciparay	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100%	85.500.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Ciparay	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100%	89.975.000,00	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Ciparay	Persentase pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.	100%	85.500.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Ciparay	Persentase pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.	100%	89.975.000,00	
a	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Ciparay	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	20.500.000,00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Ciparay	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	295 orang	30.985.000,00	
b	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Ciparay	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200 orang	30.000.000,00	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Ciparay	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	540 orang	30.370.000,00	
c	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kec. Ciparay	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	1 laporan	5.000.000,00	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kec. Ciparay	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	1 laporan	3.424.000,00	
d	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.	12 Dokumen	30.000.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.	12 Dokumen	25.196.000,00	

IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Ciparay	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	59.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Ciparay	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	116.106.900,00	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Ciparay	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	100%	44.000.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Ciparay	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	100%	88.656.900,00	
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	14.000.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 laporan	44.862.900,00	
b	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 laporan	30.000.000,00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 laporan	43.794.000,00	
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Ciparay	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	100%	15.000.000,00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Ciparay	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	100%	27.450.000,00	
a	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 laporan	15.000.000,00	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 laporan	27.450.000,00	
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Ciparay	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	157.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Ciparay	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	176.003.000,00	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Ciparay	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.	100%	70.000.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Ciparay	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.	100%	79.900.000,00	
a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 laporan	70.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	79.900.000,00	
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Ciparay	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi.	100%	35.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Ciparay	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi.	100%	36.103.000,00	
a	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	20.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	25.645.300,00	

b	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	15.000.000	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	10.457.700,00	
3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Ciparay	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	52.000.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Ciparay	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	60.000.000,00	
a	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Ciparay	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 keluarga	24.000.000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Ciparay	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	67 keluarga	19.840.100,00	
b	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec. Ciparay	Jumlah Keluarga yang MengikutPenumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 keluarga	10.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec. Ciparay	Jumlah Keluarga yang MengikutPenumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	67 keluarga	19.837.300,00	
c	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec. Ciparay	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 keluarga	9.000.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec. Ciparay	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	93 keluarga	9.948.300,00	
d	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec. Ciparay	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	100 keluarga	9.000.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec. Ciparay	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	99 keluarga	10.374.300,00	
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Ciparay	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	75.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Ciparay	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	106.488.000,00	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Ciparay	Persentase desa yang dibina.	100%	75.000.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Ciparay	Persentase desa yang dibina.	100%	106.488.000,00	
a	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	2.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	10.445.300,00	
b	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	8.954.300,00	
c	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	20.180.600,00	

d	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1 laporan	2.000.000	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1 laporan	10.445.300,00	
e	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10 Dokumen	19.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
f	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	30.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Ciparay	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	52.440.600,00	
g	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 laporan	2.000.000,00	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Ciparay	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 laporan	4.021.900,00	
	Jumlah Total				5.030.227.078,00	Jumlah Total				6.818.189.468,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Ciparay Tahun 2025 merupakan perubahan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025. Selanjutnya, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Ciparay Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Ciparay dituntut untuk siap dan sanggup melaksanakan pembangunan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Proses penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Ciparay Tahun 2025 memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Kegiatan Musrenbang merupakan hasil dari sebuah perencanaan yang tertuang dalam rencana kerja kecamatan dan menghasilkan dokumen usulan yang merupakan hasil kinerja dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Adapun proses kegiatan musrenbang diawali dengan adanya usulan dari desa-desa atau bersifat bottom up untuk dijadikan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan sehingga menjadi DSP. Setelah menjadi DSP maka dilaksanakan pra musrenbang dan musrenbang di tingkat kecamatan

untuk direview dan diputuskan oleh dinas/instansi terkait DSP mana saja yang secara kriteria teknis dapat menjadi DSP untuk musrenbang kabupaten.

Kesesuaian DSP yang diusulkan oleh desa ke tingkat kecamatan dan kabupaten yaitu DSP yang sesuai dengan kriteria teknis pelaksanaan pembangunan di tahun 2025. Jikalau tidak sesuai, maka usulan tersebut dapat ditolak namun bisa diajukan kembali di musrenbang tahun mendatang jika kriteria teknisnya sesuai.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN CIPARAY

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam proses penyusunan Renja harus memperhatikan prioritas nasional maupun prioritas Pembangunan daerah. Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ciparay harus selaras dengan prioritas Pembangunan nasional dan daerah. Berikut adalah keselarasan program Kecamatan Ciparay dengan prioritas program nasional:

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Kecamatan
I	PN 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		
1	Digitalisasi pelayanan publik	Reformasi birokrasi integratif, inovatif, dan dinamis	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2	Penyusunan dasar hukum pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3	Penyusunan dasar hukum pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4	Kolaborasi pencegahan penyalahgunaan narkoba		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Selain prioritas Pembangunan, perlu juga disandingkan strategi dan kebijakan Kecamatan Ciparay dengan Kabupaten Bandung. Berikut adalah strategi dan kebijakan antara Kabupaten Bandung dan Kecamatan Ciparay:

Kabupaten Bandung		Kecamatan Ciparay	
Strategi	Kebijakan	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kepuasan masyarakat akan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan public	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Peningkatan kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik
		Meningkatkan kualitas pemerintahan desa	Peningkatan kualitas pemerintahan desa

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Ciparay

Dalam rangka mewujudkan Misi Bupati Bandung, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Perubahan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung sebelumnya, adalah sebagai berikut:

TUJUAN	URAIAN	
	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai AKIP
		Persetase BMD dalam Kondisi Baik
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM
	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Jumlah desa yang cepat berkembang

Untuk tujuan dan sasaran tersebut didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan. Secara lengkap dalam table berikut ini:

Tabel Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP			Tujuan dan sasaran berdasarkan desk dengan bagian organisasi Setda Kab Bandung
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Tercapainya pemenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
8	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
9	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
10	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Terselenggaranya validasi pendukung statistik sektoral daerah	Penyelenggaraan validasi pendukung statistik sektoral daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
11	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Terlaksananya pengumpulan data statistik sektoral daerah	pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	

10	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Tercapainya pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen keuangan		
11	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
12	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
13	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
14	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Tercapainya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase rata-rata pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		
15	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
16	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
17	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
18	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
19	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas kunjungan tamu			Jumlah laporan Fasilitas kunjungan tamu	
20	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

21	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Tercapainya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah	
22	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Terlaksananya Penyediaan Jasa surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
23	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
24	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
25	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Tercapainya pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database	
26	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
27	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD			Jumlah penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
28	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Tercapainya pemenuhan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai $\geq 80\%$	
29	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
30	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
31	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
32	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
33	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan	Tercapainya pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan barang milik daerah	

34	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
35	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya			Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	
36	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
37	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
38	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
39	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya			jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	
40	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
41	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Ciparay	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
42	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM			
43	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tercapainya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.		
44	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	

45	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
46	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan.		
47	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
48	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
49	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tercapainya pemenuhan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.		
50	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
51	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tercapainya pemenuhan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Urusan pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan.		
52	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	
53	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
54	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah			

55	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tercapainya pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.	
56	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
57	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
58	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
59	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila
60	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
61	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum		
62	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tercapainya pemenuhan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	
63	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
64	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
65	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	

66	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
67	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan			
68	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tercapainya pemenuhan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.		
69	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
70	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tercapainya fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi.		
71	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
72	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
73	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tercapainya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		
74	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
75	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			Jumlah Keluarga yang MengikutPenumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
76	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	

77	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
78	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi			
79	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tercapainya pemenuhan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		<i>Persentase desa yang dibina.</i>		
80	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	
81	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
82	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
83	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	
84	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
85	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Ciparay dalam Perencanaan Tahun 2025, antara lain:

TC. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN CIPARAY

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Rencana Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	1	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Kecamatan Ciparay	78,00	5.892.486.154,00	APBD Kab. Bandung		78,50	4.335.227.078,00
7	1	1	2,01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Ciparay	100%	27.378.926,00	APBD Kab. Bandung		100%	6.900.000,00
7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Ciparay	6 dokumen	12.707.500,00	APBD Kab. Bandung		6 dokumen	1.500.000,00
7	1	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Ciparay	2 Dokumen	1.316.000,00	APBD Kab. Bandung		2 Dokumen	700.000,00
7	1	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Ciparay	2 Dokumen	1.316.000,00	APBD Kab. Bandung		2 Dokumen	1.000.000,00
7	1	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Ciparay	2 Dokumen	1.316.000,00	APBD Kab. Bandung		2 Dokumen	900.000,00
7	1	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Ciparay	2 Dokumen	1.316.000,00	APBD Kab. Bandung		2 Dokumen	1.000.000,00
7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kecamatan Ciparay	6 laporan	6.050.000,00	APBD Kab. Bandung		6 laporan	1.000.000,00
7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Ciparay	6 laporan	1.620.000,00	APBD Kab. Bandung		6 laporan	800.000,00
7	1	1	2,01	8	Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Ciparay	1 dokumen	883.326,00	APBD Kab. Bandung			
7	1	1	2,01	9	pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kecamatan Ciparay	56 data	854.100,00	APBD Kab. Bandung			

7	1	1	2,02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen keuangan	Kecamatan Ciparay	100%	4.604.025.764,00	APBD Kab. Bandung		100%	3.891.763.698,00
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Ciparay	228 orang/bulan	4.602.705.764,00	APBD Kab. Bandung		228 orang/bulan	3.890.763.698,00
7	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Ciparay	2 laporan	660.000,00	APBD Kab. Bandung		2 laporan	500.000,00
7	1	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Ciparay	6 laporan	660.000,00	APBD Kab. Bandung		6 laporan	500.000,00
7	1	1	2,05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80%	Kecamatan Ciparay	100%	106.468.000,00	APBD Kab. Bandung		100%	31.451.000,00
7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Ciparay	2 paket	24.000.000,00	APBD Kab. Bandung		19 paket	9.000.000,00
7	1	1	2,05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Ciparay	3 dokumen	949.400,00	APBD Kab. Bandung		3 dokumen	500.000,00
7	1	1	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Ciparay	40 orang	40.759.300,00	APBD Kab. Bandung		19 orang	16.951.000,00
7	1	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Ciparay	23 orang	40.759.300,00	APBD Kab. Bandung		19 orang	5.000.000,00
7	1	1	2,06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Ciparay	100%	219.824.599,00	APBD Kab. Bandung		100%	34.900.000,00
7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Ciparay	5 paket	7.251.000,00	APBD Kab. Bandung		3 paket	500.000,00
7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Ciparay	34 paket	142.862.950,00	APBD Kab. Bandung		12 paket	19.250.000,00
7	1	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Ciparay	21 paket	11.510.649,00	APBD Kab. Bandung		10 paket	1.000.000,00
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Ciparay	1 paket	850.000,00	APBD Kab. Bandung		1 paket	150.000,00
7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Ciparay	13 dokumen	9.900.000,00	APBD Kab. Bandung		5 dokumen	1.000.000,00
7	1	1	2,06	8	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu	Kecamatan Ciparay	4 laporan	6.500.000,00	APBD Kab. Bandung		4 laporan	1.000.000,00
7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Ciparay	296 laporan	40.950.000,00	APBD Kab. Bandung		100 laporan	12.000.000,00

7	1	1	2,08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah	Kecamatan Ciparay	100%	326.819.061,00	APBD Kab. Bandung		100%	306.602.380,00
7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Ciparay	2 laporan	2.800.000,00	APBD Kab. Bandung		2 laporan	1.400.000,00
7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Ciparay	12 laporan	40.810.861,00	APBD Kab. Bandung		12 laporan	54.013.380,00
7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Ciparay	12 laporan	283.208.200,00	APBD Kab. Bandung		12 laporan	251.189.000,00
7	1	1	2,03	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database	Kecamatan Ciparay	100%	620.000,00	APBD Kab. Bandung		100%	1.000.000,00
7	1	1	2,03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Ciparay	4 laporan	310.000,00	APBD Kab. Bandung		4 laporan	500.000,00
7	1	1	2,03	6	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Ciparay	4 laporan	310.000,00	APBD Kab. Bandung		4 laporan	500.000,00
7	1	1	2,07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	Kecamatan Ciparay	100%	59.983.500,00	APBD Kab. Bandung		100%	8.000.000,00
7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Ciparay	4 unit	50.186.200,00	APBD Kab. Bandung		2 unit	3.000.000,00
7	1	1	2,07	6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kecamatan Ciparay	2 unit	9.797.300,00	APBD Kab. Bandung		2 unit	5.000.000,00
7	1	1	2,09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ciparay	100%	547.366.304,00	APBD Kab. Bandung		100%	54.610.000,00
7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Ciparay	11 unit	74.580.000,00	APBD Kab. Bandung		10 unit	41.930.000,00
7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Ciparay	8 unit	5.240.000,00	APBD Kab. Bandung		2 unit	2.680.000,00
7	1	1	2,09	9	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kecamatan Ciparay	1 unit	467.546.304,00	APBD Kab. Bandung		1 unit	4.000.000,00
7	1	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Ciparay			APBD Kab. Bandung		1 unit	4.000.000,00
7	1	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Ciparay			APBD Kab. Bandung		1 unit	2.000.000,00
					Jumlah 1		Kecamatan Ciparay		5.892.486.154,00	APBD Kab. Bandung			4.335.227.078,00

7	1	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	Kecamatan Ciparay	89,99	437.130.414,00	APBD Kab. Bandung		90,00	378.500.000,00
7	1	2	2,01	0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.</i>	Kecamatan Ciparay	100%	10.000.000,00	APBD Kab. Bandung		100%	10.500.000,00
7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Ciparay	1 laporan	5.000.000,00	APBD Kab. Bandung		1 laporan	5.250.000,00
7	1	2	2,01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ciparay	1 Dokumen	5.000.000,00	APBD Kab. Bandung		1 Dokumen	5.250.000,00
7	1	2	2,02	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di</i>	Kecamatan Ciparay	100%	69.602.948,00	APBD Kab. Bandung		100%	33.000.000,00
7	1	2	2,02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Ciparay	1 dokumen	4.107.400,00	APBD Kab. Bandung		1 dokumen	4.000.000,00
7	1	2	2,02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ciparay	1 laporan	7.750.248,00	APBD Kab. Bandung		1 laporan	7.000.000,00
7	1	2	2,02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ciparay	1 laporan	57.745.300,00	APBD Kab. Bandung		2 laporan	22.000.000,00
7	1	2	2,03	0	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	<i>Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.</i>	Kecamatan Ciparay	100%	52.000.000,00	APBD Kab. Bandung		100%	50.000.000,00
7	1	2	2,03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Ciparay	4 Dokumen	52.000.000,00	APBD Kab. Bandung		3 Dokumen	50.000.000,00
7	1	2	2,04	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase Urusan pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan.</i>	Kecamatan Ciparay	100%	305.527.466,00	APBD Kab. Bandung		100%	285.000.000,00
7	1	2	2,04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Ciparay	1 dokumen	4.985.766,00	APBD Kab. Bandung		2 dokumen	5.000.000,00

7	1	2	2,04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Ciparay	21 laporan	300.541.700,00	APBD Kab. Bandung		10 laporan	280.000.000,00
7	1	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Kecamatan Ciparay	100%	89.975.000,00	APBD Kab. Bandung		100%	85.500.000,00
7	1	5	2,01	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.	Kecamatan Ciparay	100%	89.975.000,00	APBD Kab. Bandung		100%	85.500.000,00
7	1	5	2,01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Ciparay	295 orang	30.985.000,00	APBD Kab. Bandung		200 orang	20.500.000,00
7	1	5	2,01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Ciparay	540 orang	30.370.000,00	APBD Kab. Bandung		200 orang	30.000.000,00
7	1	5	2,01	5	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kecamatan Ciparay	1 laporan	3.424.000,00	APBD Kab. Bandung		1 laporan	5.000.000,00
7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.	Kecamatan Ciparay	12 Dokumen	25.196.000,00	APBD Kab. Bandung		12 Dokumen	30.000.000,00
7	1	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Ciparay	100%	116.122.666,00	APBD Kab. Bandung		100%	59.000.000,00
7	1	4	2,01	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	Kecamatan Ciparay	100%	88.672.666,00	APBD Kab. Bandung		100%	44.000.000,00
7	1	4	2,01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ciparay	3 laporan	44.878.666,00	APBD Kab. Bandung		2 laporan	14.000.000,00
7	1	4	2,01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Ciparay	4 laporan	43.794.000,00	APBD Kab. Bandung		4 laporan	30.000.000,00

7	1	4	2,02	0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Kecamatan Ciparay	100%	27.450.000,00	APBD Kab. Bandung		100%	15.000.000,00
7	1	4	2,02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Ciparay	2 laporan	27.450.000,00	APBD Kab. Bandung		2 laporan	15.000.000,00
7	1	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan Ciparay	100%	176.003.000,00	APBD Kab. Bandung		100%	157.000.000,00
7	1	3	2,01	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.	Kecamatan Ciparay	100%	79.900.000,00	APBD Kab. Bandung		100%	70.000.000,00
7	1	3	2,01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ciparay	4 laporan	79.900.000,00	APBD Kab. Bandung		3 laporan	70.000.000,00
7	1	3	2,03	0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi.	Kecamatan Ciparay	100%	36.103.000,00	APBD Kab. Bandung		100%	35.000.000,00
7	1	3	2,03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Ciparay	1 laporan	25.645.300,00	APBD Kab. Bandung		1 laporan	20.000.000
7	1	3	2,03	5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Ciparay	1 laporan	10.457.700,00	APBD Kab. Bandung		1 laporan	15.000.000
7	1	3	2,06	0	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Ciparay	100%	60.000.000	APBD Kab. Bandung		100%	52.000.000
7	1	3	2,06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Ciparay	67 keluarga	19.840.100,00	APBD Kab. Bandung		100 keluarga	24.000.000
7	1	3	2,06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan	Kecamatan Ciparay	67 keluarga	19.837.300,00	APBD Kab. Bandung		100 keluarga	10.000.000
7	1	3	2,06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kecamatan Ciparay	93 keluarga	9.948.300,00	APBD Kab. Bandung		100 keluarga	9.000.000
7	1	3	2,06	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kecamatan Ciparay	99 keluarga	10.374.300,00	APBD Kab. Bandung		100 keluarga	9.000.000

7	1	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Kecamatan Ciparay	100%	106.488.000,00	APBD Kab. Bandung		100%	80.000.000,00
7	1	6	2,01	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina.	Kecamatan Ciparay	100%	106.488.000,00	APBD Kab. Bandung		100%	80.000.000,00
7	1	6	2,01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Ciparay	1 Dokumen	10.445.300,00	APBD Kab. Bandung		1 Dokumen	2.000.000,00
7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Ciparay	2 Dokumen	8.954.300,00	APBD Kab. Bandung		2 Dokumen	20.000.000,00
7	1	6	2,01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Ciparay	2 Dokumen	20.180.600,00	APBD Kab. Bandung		2 Dokumen	20.000.000,00
7	1	6	2,01	4	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Ciparay	1 laporan	10.445.300,00	APBD Kab. Bandung		1 laporan	4.000.000
7	1	6	2,01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Ciparay	2 Dokumen	52.440.600,00	APBD Kab. Bandung		2 Dokumen	30.000.000
7	1	6	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Ciparay	1 laporan	4.021.900,00	APBD Kab. Bandung		1 laporan	4.000.000,00
					Jumlah 2				925.719.080,00				760.000.000,00
					Jumlah Total				6.818.205.234,00				5.095.227.078,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CIPARAY

Rencana program beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Renstra, selanjutnya dijabarkan oleh Kecamatan Ciparay kedalam rencana kegiatan untuk setiap program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif Renja adalah sebagai berikut:

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
KECAMATAN CIPARAY

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun Rencana)				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik	7	1	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Kecamatan Ciparay	78,00	5.892.486.154,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Ciparay	100%	27.378.926,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Ciparay	6 dokumen	12.707.500,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Ciparay	2 Dokumen	1.316.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Ciparay	2 Dokumen	1.316.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Ciparay	2 Dokumen	1.316.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Ciparay	2 Dokumen	1.316.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Ciparay	6 laporan	6.050.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Ciparay	6 laporan	1.620.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,01	8	Penyelenggaraan validata pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Ciparay	1 dokumen	883.326,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,01	9	pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kecamatan Ciparay	56 data	854.100,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen keuangan	Kecamatan Ciparay	100%	4.604.025.764,00	APBD Kab. Bandung	

		7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Ciparay	228 orang/bulan	4.602.705.764,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Ciparay	2 laporan	660.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Ciparay	6 laporan	660.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80%	Kecamatan Ciparay	100%	106.468.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Ciparay	2 paket	24.000.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Ciparay	3 dokumen	949.400,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Ciparay	40 orang	40.759.300,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Ciparay	23 orang	40.759.300,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Ciparay	100%	219.824.599,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Ciparay	5 paket	7.251.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Ciparay	34 paket	142.862.950,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Ciparay	21 paket	11.510.649,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Ciparay	1 paket	850.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Ciparay	13 dokumen	9.900.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,06	8	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu	Kecamatan Ciparay	4 laporan	6.500.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Ciparay	296 laporan	40.950.000,00	APBD Kab. Bandung	

		7	1	1	2,08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah	Kecamatan Ciparay	100%	326.819.061,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Ciparay	2 laporan	2.800.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Ciparay	12 laporan	40.810.861,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Ciparay	12 laporan	283.208.200,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,03	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database	Kecamatan Ciparay	100%	620.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Ciparay	4 laporan	310.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,03	6	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Ciparay	4 laporan	310.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	Kecamatan Ciparay	100%	59.983.500,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Ciparay	4 unit	50.186.200,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,07	6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kecamatan Ciparay	2 unit	9.797.300,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ciparay	100%	547.366.304,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Ciparay	11 unit	74.580.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Ciparay	8 unit	5.240.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,09	9	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kecamatan Ciparay	1 unit	467.546.304,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Ciparay			APBD Kab. Bandung	
		7	1	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Ciparay			APBD Kab. Bandung	

2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	7	1	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	Kecamatan Ciparay	89,99	437.130.414,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	2	2,01	0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.</i>	Kecamatan Ciparay	100%	10.000.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Ciparay	1 laporan	5.000.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	2	2,01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ciparay	1 Dokumen	5.000.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	2	2,02	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan.</i>	Kecamatan Ciparay	100%	69.602.948,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	2	2,02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Ciparay	1 dokumen	4.107.400,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	2	2,02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ciparay	1 laporan	7.750.248,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	2	2,02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ciparay	1 laporan	57.745.300,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	2	2,03	0	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	<i>Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.</i>	Kecamatan Ciparay	100%	52.000.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	2	2,03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Ciparay	4 Dokumen	52.000.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	2	2,04	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase Urusan pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan.</i>	Kecamatan Ciparay	100%	305.527.466,00	APBD Kab. Bandung	

		7	1	2	2,04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>	Kecamatan Ciparay	1 dokumen	4.985.766,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	2	2,04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Ciparay	21 laporan	300.541.700,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Kecamatan Ciparay	100%	89.975.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	5	2,01	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.</i>	Kecamatan Ciparay	100%	89.975.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	5	2,01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Ciparay	295 orang	30.985.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	5	2,01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Ciparay	540 orang	30.370.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	5	2,01	5	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	<i>Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>	Kecamatan Ciparay	1 laporan	3.424.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.</i>	Kecamatan Ciparay	12 Dokumen	25.196.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Ciparay	100%	116.106.900,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	4	2,01	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.</i>	Kecamatan Ciparay	100%	88.656.900,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	4	2,01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ciparay	3 laporan	44.862.900,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	4	2,01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Ciparay	4 laporan	43.794.000,00	APBD Kab. Bandung	

3	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	7	1	4	2,02	0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.</i>	Kecamatan Ciparay	100%	27.450.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	4	2,02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Ciparay	2 laporan	27.450.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan Ciparay	100%	176.003.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	3	2,01	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.</i>	Kecamatan Ciparay	100%	79.900.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	3	2,01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ciparay	4 laporan	79.900.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	3	2,03	0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi.</i>	Kecamatan Ciparay	100%	36.103.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	3	2,03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Ciparay	1 laporan	25.645.300,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	3	2,03	5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Ciparay	1 laporan	10.457.700,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	3	2,06	0	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Ciparay	100%	60.000.000	APBD Kab. Bandung	
		7	1	3	2,06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Ciparay	67 keluarga	19.840.100,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	3	2,06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Ciparay	67 keluarga	19.837.300,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	3	2,06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kecamatan Ciparay	93 keluarga	9.948.300,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	3	2,06	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kecamatan Ciparay	99 keluarga	10.374.300,00	APBD Kab. Bandung	

		7	1	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Kecamatan Ciparay	100%	106.488.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	6	2,01	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina.	Kecamatan Ciparay	100%	106.488.000,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	6	2,01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Ciparay	1 Dokumen	10.445.300,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Ciparay	2 Dokumen	8.954.300,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	6	2,01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Ciparay	2 Dokumen	20.180.600,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	6	2,01	4	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Ciparay	1 laporan	10.445.300,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	6	2,01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Ciparay	2 Dokumen	52.440.600,00	APBD Kab. Bandung	
		7	1	6	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Ciparay	1 laporan	4.021.900,00	APBD Kab. Bandung	
							Jumlah Total				6.818.189.468,00		

Tahun 2025, Kecamatan Ciparay mendapat pagu anggaran Perubahan sebesar Rp. 6.818.189.468,00 yang memuat 6 program dalam mengusung misi visi Kabupaten Bandung. Program-program tersebut, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB V

PENUTUP

1.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Ciparay Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahun 2025 yang disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025. Selain itu, RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahun 2025 yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

1.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA Perubahan Kecamatan Ciparay Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan tahun 2025, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Ciparay Tahun 2025 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karena perlu peningkatan kapasitas dan kinerja SDM baik melalui BinteK, Seminar/Workshop, Diklat dan sebutan lainnya guna menyelaraskan penyusunan Renja sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ciparay Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten
3. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya (RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra).
4. RENJA Perubahan Kecamatan Ciparay Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

1.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
2. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek,

pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur.

3. Menerapkan sistem *reward* and *punishment* terhadap seluruh karyawan.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Akhir kata kami beserta Aparat Pemerintah Kecamatan Ciparay mengharapkan agar RENJA Perubahan Tahun 2025 ini dapat memenuhi akuntabilitas kami kepada *Stake Holders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

CAMAT CIPARAY

ttd

RACHMAT

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA